

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Kementerian Dalam Negeri Loloskan Tambahan Dana Partai Jakarta

APBD 2019 DKI bisa cair awal Januari.

Linda Hairani

linda.hairani@tempo.co.id

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meloloskan tambahan bantuan keuangan untuk partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019 DKI Jakarta. Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Mohamad Taufik, mengatakan kenaikan dana untuk partai tak tercantum dalam catatan evaluasi Kementerian atas APBD 2019. "Tidak ada dalam evaluasi, diizinkan," kata dia kemarin.

Taufik menuturkan evaluasi Kementerian telah dibahas oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Jumat pekan lalu. Semula, alokasi dana bantuan partai dari APBD adalah Rp 5,3 miliar, dengan perhitungan Rp 1.200 per suara sah. Dalam rapat akhir Badan Anggaran

DPRD akhir November lalu, nilainya diusulkan naik dua kali lipat. Akhirnya, dalam APBD 2019, bantuan keuangan untuk partai politik nilainya menjadi Rp 10,6 miliar.

Angka awal Rp 1.200 per suara sah untuk bantuan partai politik tingkat provinsi diatur dalam Pasal 5 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Pasal 5 ayat 7 aturan yang sama menyatakan nilai bantuan keuangan juga dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono, menambahkan, di provinsi lain, selain dari APBD provinsi, partai politik juga mendapat bantuan keuangan dari APBD tingkat kota atau kabupaten. Total nilai bantuan keuangan yang diterima partai dari dua APBD itu adalah hasil perkalian Rp 2.400 dengan perolehan suara sah partai pada pemilihan legislatif 2014.

Sedangkan di Jakarta, menurut Gembong, tak ada APBD tingkat kota. Bantuan keuangan dari APBD provinsi pun digunakan partai untuk membiayai kegiatan hingga wilayah rukun warga. "Tak cukup, padahal partai punya pengurus hingga tingkat ranting," kata dia.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, Taufan Bakri, mengatakan nilai per suara sah diizinkan naik dari Rp 1.200 menjadi Rp 2.400. "Dalam aturannya, jika anggaran daerah mencukupi, nilainya boleh dilipatkan," kata dia.

Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Syarifuddin, belum menjelaskan pertimbangan kenaikan bantuan keuangan untuk partai tersebut. Dia belum menjawab panggilan telepon dan pesan *Tempo* sampai berita ini disiapkan.

Di luar dana bantuan keuangan partai politik, menurut Taufik, evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD tergolong singkat. Saat disusun, ran-

cangan APBD 2019 sudah mencantumkan nilai proyek hingga satuan terkecil. Anggaran tersebut sudah bisa digunakan mulai 1 Januari mendatang.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta, Edi Sumantri, memastikan anggaran daerah masih mencukupi jika dana bantuan keuangan untuk partai politik naik. Nilai APBD 2019 totalnya Rp 89,08 triliun. Nilai itu sudah termasuk dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat yang sudah dijamin Kementerian Keuangan. Nilainya Rp 1,9 triliun. "Dananya sudah pasti tersedia," kata Edi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini, mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 membatasi nilai Rp 1.200 untuk tiap suara sah. Namun, aturan itu juga membolehkan pemerintah daerah meningkatkan nilainya selama anggarannya mencukupi. "Memang dimungkinkan menurut PP," kata dia.

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Kementerian Dalam Negeri Loloskan Tambahan Dana Partai Jakarta

Yang Ditolak dan Diizinkan

Kementerian Dalam Negeri mencoret beberapa anggaran kegiatan pemerintah DKI Jakarta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019. Salah satunya anggaran pemeliharaan jalan di kompleks instansi vertikal, seperti TNI dan Polri, di wilayah DKI Jakarta. Alokasi anggaran itu nilainya Rp 20 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Edi Sumantri, menjelaskan, Kemdagri menolak anggaran pemeliharaan jalan tersebut karena status tanahnya milik TNI dan Polri, bukan milik pemerintah DKI. "Kecuali wilayah tersebut merupakan kewenangan Pemprov DKI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," kata Edi, Jumat lalu. Sebagai gantinya, anggaran perbaikan jalan itu dialihkan menjadi hibah barang.

Poin lain yang juga ikut dicoret adalah anggaran Rp 1,03 miliar untuk ganti rugi pohon tumbang. Kemdagri tak menyetujui anggaran ganti rugi itu karena menganggap dasar hukumnya tak jelas.

Adapun kengikisan bantuan keuangan untuk partai politik diizinkan Kementerian. Nilainya naik menjadi Rp 10,6 miliar lantaran ada perubahan nilai per suara sah. Berikut ini rekapitulasi dana bantuan partai politik itu:

Nomor	Partai	Perolehan Kursi 2014	Perolehan Suara 2014	Bantuan Dana
1	NasDem	5	206.117	Rp 494.680.800
2	PKB	6	260.159	Rp 624.381.600
3	PKS	11	424.400	Rp 1.018.560.000
4	PDI Perjuangan	28	1.231.843	Rp 2.956.423.200
5	Golkar	9	376.221	Rp 902.930.400
6	Gerindra	15	592.472	Rp 1.421.932.800
7	Demokrat	10	360.929	Rp 866.229.600
8	PAN	2	172.784	Rp 414.681.600
9	PPP	10	452.224	Rp 1.085.337.600
10	Hanura	10	357.007	Rp 856.816.800
	Jumlah	106	4.434.156	Rp 10.641.974.400

● KETERANGAN: JUMLAH BANTUAN KEUANGAN 2019 BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILU 2014 DIKALI RP 2.400 PER SUARA.

● SUMBER: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DKI JAKARTA

● LINDA HAIRANI